

# Koordinasi yang Kuat dan Respon Cepat Pemerintah Daerah Diperlukan untuk Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi



## KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

### SIARAN PERS

HM.4.6/319/SET.M.EKON.3/6/2022

### Koordinasi yang Kuat dan Respon Cepat Pemerintah Daerah Diperlukan untuk Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi

Jakarta, 19 Juni 2022

Indikator sektor eksternal Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang solid. Hal ini tercermin dari tren surplus neraca perdagangan selama 25 bulan berturut-turut, serta rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB berada pada level yang aman.

Prospek ekonomi yang membaik ini akan membantu menjaga kepercayaan publik dan investor, sehingga dapat mendorong kegiatan perekonomian nasional, meski dalam keadaan ketidakpastian global yang melanda.

Adapun saat ini dunia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan yang disebut oleh PBB sebagai *The Perfect Storm*, tantangan tersebut adalah Covid-19, *Conflict*, *Climate Change*, *Commodity Prices*, dan *Cost of Living*. Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 menjadi 2,9%, dari sebelumnya 4,4% utamanya sebagai imbas konflik geopolitik Rusia dan Ukraina.

“Karena itu, koordinasi yang kuat sangat diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan. Respons cepat dari seluruh pihak dibutuhkan untuk dapat mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional. Momentum Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 juga akan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara daring pada Rakernas ke-14 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2022 yang bertema “Dengan Semangat Kolaborasi Kita Sukseskan KTT G20 Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang Kuat dan Berkelanjutan” yang berlangsung Sabtu (18/06).

Di tengah berbagai risiko ketidakpastian global yang eskalatif, Pemerintah terus melanjutkan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Terhadap alokasi PEN tersebut, Pemerintah memberi perhatian yang serius terhadap sektor UMKM.

Di setiap periode krisis, UMKM yang menyumbang 61% terhadap PDB nasional, bersifat resilien dan dapat pulih dengan cepat. Oleh karena itu, pengembangan UMKM merupakan prasyarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi lagi.

Peningkatan akses pembiayaan menjadi salah satu strategi pengembangan UMKM, diantaranya melalui program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Kami sangat mengapresiasi peran Bapak/Ibu Bupati dan Walikota atas dukungan untuk tersalurnya berbagai skema KUR di wilayah masing-masing pada tahun 2022 ini. Sehingga total realisasi penyaluran KUR nasional sampai dengan 31 Mei 2022 sebesar Rp147,7 triliun

atau 39,6% dari target yang telah diberikan kepada 3,18 juta debitur,” ucap Menko Airlangga.

Secara khusus, dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian, Pemerintah telah mengeluarkan program KUR untuk sektor pertanian dengan plafon sebesar Rp90 triliun dan sudah tersalurkan Rp46,6 triliun atau sebesar 51,8% dari target.

Selain program KUR Pertanian, Kemenko Perekonomian melalui POKJA Pupuk Bersubsidi bersama K/L terkait merumuskan transformasi tata kelola subsidi pupuk dengan melakukan refocusing target subsidi pupuk untuk meningkatkan jumlah pupuk dan transformasi digital agar pupuk subsidi tepat sasaran. Kebijakan *refocusing* target subsidi diberlakukan untuk 2 jenis pupuk yaitu Urea dan NPK, dan 9 Komoditas strategis yakni padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, tebu rakyat, kakao, dan kopi.

Sementara itu, menyadari bahwa infrastruktur merupakan komponen yang vital dalam mendorong pemulihan ekonomi, Pemerintah akan melanjutkan Program Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2022.

Sejak 2019, masyarakat Indonesia telah mendapatkan manfaat dari beroperasinya beberapa infrastruktur PSN, seperti proyek Palapa Ring Broadband yang meningkatkan akses konektivitas jaringan ke lebih dari 500 Kabupaten/Kota di Indonesia, beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatra sepanjang 543 km sebagai bagian dari upaya percepatan pengembangan Sumatra, terbangunnya 18 Bendungan Strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan, serta beroperasinya Sistem Penyediaan Air Bersih yang melayani lebih dari 2 juta orang.

“Agar pembangunan PSN dapat optimal, diharapkan agar setiap daerah dapat mengidentifikasi sektor unggulan yang memiliki potensi untuk mengungkit perekonomian dan mendukung optimalisasi Proyek Strategis Nasional khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota,” ucap Menko Airlangga.

Beberapa contoh bentuk dukungan dalam optimalisasi PSN di Kabupaten/ Kota diantaranya adalah pembangunan Kawasan Industri, Pariwisata dan ekonomi di sepanjang jalan Tol Trans Sumatera dan Trans Jawa, pelebaran dan perbaikan jalan daerah di sekitar akses keluar jalan Tol PSN, serta dukungan dalam percepatan penerbitan perizinan, pengadaan tanah asset Pemerintah Daerah, Tanah Kas Desa, dan administrasi lainnya. (ag/fsr)

\*\*\*

**Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan  
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  
Haryo Limanseto**

Website: [www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id)

Twitter, Instagram, Facebook, Tiktok, dan YouTube: @PerekonomianRI

Email: [humas@ekon.go.id](mailto:humas@ekon.go.id)

LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia